

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoretis

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Menurut PSAK Pasal 1 tahun 2017, pengertian laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan keuangan kinerja suatu entitas. Sedangkan menurut Weygant, Warfield, & Kieso (2016:21-25) laporan keuangan adalah sarana utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak luar. Laporan ini memberikan sejarah perusahaan yang diukur dalam satuan mata uang.

Menurut Prof. Dr. H. Lili M. Sadeli (2018:18), laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Posisi keuangan memberikan gambaran tentang bagaimana susunan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan sumber-sumber kekayaan itu didapat. Perubahan posisi keuangan menunjukkan kemajuan perusahaan, memberikan gambaran tentang seberapa besar perusahaan memperoleh laba dalam melaksanakan kegiatan usahanya, serta apakah perusahaan mengalami perkembangan yang menunjukkan manajemen telah mengelola perusahaan dengan berhasil.

Pelaporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang dibutuhkan banyak pengguna secara ekonomi dalam pengambilan keputusan. Pengguna laporan keuangan yang terutama adalah investor dan kreditor

sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya keuangan yang dipercayakan investor dan kreditor. Informasi keuangan juga digunakan oleh karyawan, pelanggan dan pemerintah untuk kebutuhan-kebutuhan masing-masing yang terkait dengan entitas usaha. Para pengguna laporan keuangan merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang bisnis dan informasi keuangan.

Menurut Prof. Dr. H. Lili M. Sadeli (2018:8), tujuan umum pelaporan keuangan antara lain sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang kekayaan dan kewajiban.
- b. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.
- c. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih yang bukan berasal dari kegiatan usaha.
- d. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan perusahaan memperoleh laba.
- e. Menyajikan informasi lain yang sesuai atau relevan dengan keperluan para pemakainya.

2.1.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan serta mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 (1998) yaitu Usaha Kecil Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas

merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 (2008) UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yakni:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak RP. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari RP. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha menengah, yaitu :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik (2013), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga, BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu:

- a. Industri Mikro dengan pekerja 1-4 orang.
- b. Industri Kecil dengan pekerja 5-19 orang.
- c. Industri Menengah dengan pekerja 20-99 orang.

Tabel 2. 1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Tipe Usaha	Penjualan Per Tahun (Rupiah)	Total Aset (Rupiah)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
Mikro	≤ 300 juta	≤ 50 juta	1 – 4
Kecil	>300 juta s/d ≤2,5 M	>50 juta s/d ≤500 juta	5 – 19
Menengah	>2,5 milyar s/d ≤50 M	>500 juta s/d ≤ 10 M	20 – 99

Sumber: UU RI No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

2.1.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang juga diintensikan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. Namun seiring perkembangannya, terdapat kebutuhan mengenai ketersediaan standar akuntansi yang lebih sederhana karena keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pada tahun 2016 DSAK IAI mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sebagai upaya untuk mendukung kemajuan perekonomian di Indonesia. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016:xi).

Entitas mikro, kecil dan menengah (EMKM) adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013:1), SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang:

a. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :

- 1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
- 2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

Melihat bahwa usaha kecil dan menengah sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka standar akuntansi bagi usaha kecil menengah adalah SAK EMKM. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dibentuk untuk membantu dan mempermudah para pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangannya. Penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang sudah ditetapkan pada UMKM berguna untuk mewujudkan dan mengembangkan UMKM yang mandiri serta dapat membantu dalam hal pendanaan baik yang didapatkan dari pemerintah maupun perbankan. Berikut penjelasan tentang kebijakan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM:

A. Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban serta memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas.
2. Pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

Prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran dalam SAK EMKM dilakukan pada setiap elemen yang menyusun laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan adalah setiap aset yang berupa kas, instrumen ekuitas entitas lain, dan hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain. Sedangkan liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain.

Entitas mengakui aset dan liabilitas keuangan hanya ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual aset dan liabilitas keuangan tersebut. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset dan liabilitas keuangan diukur pada harga transaksi. Biaya transaksi adalah biaya yang terkait langsung dengan perolehan aset dan liabilitas keuangan. Biaya transaksi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Pada akhir periode pelaporan, entitas mengukur aset dan liabilitas keuangannya pada harga transaksi, dan dikurangkan dengan seluruh pembayaran pokok dan seluruh pembayaran atau penerimaan bunga sampai dengan tanggal tersebut. Pada akhir periode pelaporan, entitas tidak mengakui penurunan nilai aset keuangan. Namun, entitas yang berada dalam pengawasan otoritas di bidang jasa keuangan dapat mengakui penyisihan atas pinjaman yang diberikan sesuai dengan ketentuan dari otoritas tersebut.

2. Persediaan

Persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Entitas mengakui persediaan ketika diperoleh, sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan. Teknik pengukuran biaya persediaan, seperti metode biaya standar atau metode eceran, dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya perolehan. Entitas dapat memilih menggunakan

rumus biaya masuk pertama keluar pertama (FIFO) atau rata-rata tertimbang dalam menentukan biaya perolehan persediaan. Jumlah persediaan yang mengalami penurunan dan/atau kerugian diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan dan/atau kerugian tersebut.

3. Investasi pada Ventura Bersama

Ventura bersama adalah pengaturan bersama bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut *venturer* bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Entitas mengukur investasi pada ventura bersama pada biaya perolehannya. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas investasi pada ventura bersama.

4. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam kegiatan normal usahanya, dan diharapkan akan digunakan untuk lebih dari satu periode. Entitas mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya perolehan aset tetap jika manfaat ekonomik dapat dipastikan mengalir ke dalam atau dari entitas, serta biaya dapat diukur dengan andal. Tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan. Aset tetap dicatat jika aset tetap tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli

dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensinya. Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain, maka biaya perolehan aset tetap diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Entitas mengukur seluruh aset tetap, kecuali tanah, setelah pengukuran awal pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tanah diukur pada biaya perolehan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan aset tetap dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Entitas dapat melakukan penggantian yang tidak terlalu sering atas aset tetap yang diperoleh, atau melakukan penggantian yang tidak berulang. Entitas mengakui biaya penggantian komponen aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap ketika biaya tersebut terjadi. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset tetap maupun atas tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau untuk keduanya.

Beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi. Penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dan tanpa memperhitungkan nilai residu (nilai sisa). Penyusutan aset tetap dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau ketika aset dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh.

Umur manfaat aset ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diperkirakan oleh entitas.

5. Aset Takberwujud

Aset takberwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud. Suatu aset dapat diidentifikasi jika dapat dipisahkan dari entitas, dan timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas dari hak tersebut dapat atau tidak dialihkan atau dipisahkan dari entitas. Entitas mengakui aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah jika dapat dipastikan entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Entitas mengukur aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah sebagai beban dibayar di muka sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset takberwujud meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai dengan intensinya. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran dalam rangka menghasilkan merek, logo, judul publikasi, daftar konsumen yang dihasilkan secara internal, dan hak lain yang serupa tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengeluaran tersebut tidak diakui sebagai aset takberwujud. Entitas mengukur aset takberwujud pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset takberwujud.

Aset takberwujud dianggap mempunyai umur manfaat yang terbatas. Umur manfaat aset takberwujud yang timbul dari hak kontraktual

atau hak hukum lainnya tidak melebihi periode hak kontraktual atau hukum tersebut, tetapi mungkin lebih pendek tergantung pada lamanya periode yang diharapkan entitas untuk menggunakan aset tersebut. Jika hak kontraktual atau hal lainnya untuk masa yang terbatas dapat diperbarui, maka umur manfaat aset takberwujud harus termasuk periode pembaruan hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan oleh entitas tanpa biaya yang signifikan. Entitas mengalokasikan jumlah yang dapat diamortisasikan dari aset takberwujud secara sistematis selama umur manfaatnya. Beban amortisasi untuk setiap periode diakui dalam laporan laba rugi. Amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan, yaitu ketika aset tersebut berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sesuai dengan keinginan manajemen. Amortisasi dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Amortisasi aset takberwujud dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun, dan tanpa memperhitungkan nilai residu (nilai sisa).

6. Liabilitas Dan Ekuitas

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Entitas tidak mengakui provisi dan liabilitas kontinjensi, namun entitas dapat mengungkapkan adanya provisi dan liabilitas kontinjensi jika material. Entitas juga tidak diperkenankan untuk mengakui aset kontinjensi sebagai aset. Liabilitas dikeluarkan atau

dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut telah dilunasi dengan kas atau setara kas dan/atau aset nonkas telah dibayarkan kepada pihak lain sebesar jumlah yang harus dibayarkan.

Modal yang disetor oleh pemilik dana dapat berupa kas atau setara kas atau aset non kas yang dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas, pos tambahan modal disetor disajikan untuk setiap kelebihan setoran modal atas nilai nominal saham. Untuk usaha berbadan hukum yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas, ekuitas diakui dan diukur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut.

7. Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima baik pada masa sekarang atau masa depan. Entitas dapat mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang atau penyediaan jasa ketika barang tersebut telah dijual atau jasa telah diberikan kepada pelanggan. Jika pembeli membayar sebelum barang atau jasa tersebut diberikan, maka entitas mengakui penerimaan tersebut sebagai liabilitas, yaitu pendapatan diterima dimuka. Jika pembeli belum membayar ketika barang atau jasa tersebut telah diberikan, maka entitas mengakui adanya aset, yaitu piutang usaha. Entitas mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi masing-masing sebagai pendapatan dan beban sebesar jumlah tagihan. Entitas mengakui pendapatan bunga dan dividen ketika pendapatan tersebut diterima selama periode. Entitas mengakui pendapatan lain seperti pendapatan sewa dan

royalti dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu kontrak. Entitas dapat mengakui pendapatan lain seperti keuntungan dari penjualan aset ketika kepemilikan atas aset tersebut telah beralih kepada pemilik baru. Keuntungan tersebut merupakan hasil penjualan dikurangi jumlah tercatat aset tersebut sebelum aset tersebut di jual.

Hibah adalah bantuan yang diterima oleh entitas dalam bentuk pengalihan sumber daya. Hibah termasuk hibah atau bantuan dari pemerintah maupun pihak lain yang diberikan kepada entitas bukan dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Entitas mengakui penerimaan hibah dalam laba rugi pada saat hibah tersebut diterima sebesar jumlah nominalnya. Dalam hal penerimaan hibah secara substansi merupakan bagian dari kontribusi modal dari pemilik, maka entitas mengakui hibah tersebut diluar laba rugi pada saat hibah tersebut diterima sebesar jumlah nominalnya. Hibah di dalamnya termasuk hibah aset nonmoneter seperti tanah atau sumber daya lain, tidak diakui hingga terdapat keyakinan yang memadai bahwa entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut dan hibah akan diterima.

Pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa. Seluruh biaya pinjaman diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Dalam kondisi jumlah arus kas keluar tidak dapat diukur dengan andal dan/atau waktu pengeluaran arus kasnya tidak dapat dipastikan maka beban diakui pada saat kas dibayarkan.

8. Pajak Penghasilan

Entitas mengakui aset dan liabilitas pajak penghasilan dengan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Entitas tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan.

9. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang didenominasi atau diselesaikan dalam mata uang asing yang meliputi transaksi yang timbul ketika entitas membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam mata uang asing, meminjam atau meminjamkan dana atas sejumlah utang atau piutang yang di denominasi dalam mata uang asing, memperoleh atau melepas aset, atau menyelesaikan liabilitas yang didenominasi dalam mata uang asing. Entitas mencatat transaksi yang terjadi dalam mata uang asing dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan kurs tunai pada tanggal transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan SAK EMKM.

B. Penyajian Laporan Keuangan

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016:7) menjelaskan penyajian wajar dari laporan keuangan sesuai persyaratan SAK EMKM dan pengertian laporan keuangan yang lengkap untuk entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban. Pengungkapan diperlukan ketika

kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan, yaitu:

1. Relevan, informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
2. Representasi tepat, informasi dalam laporan keuangan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.
3. Keterbandingan, informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
4. Keterpahaman, informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketentuan yang wajar.

Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK EMKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK EMKM, kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK EMKM. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan, termasuk informasi komparatifnya.

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode entitas disusun secara konsisten, kecuali:

1. Telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau jika perubahan penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan menghasilkan penyajian yang lebih sesuai dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi.
2. SAK EMKM mensyaratkan perubahan penyajian.

Jika penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah karena penerapan di atas, maka entitas mereklasifikasikan jumlah komparatif, kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Tidak praktis adalah kondisi dimana entitas tidak dapat menerapkan suatu pengaturan setelah seluruh upaya yang masuk akal dilakukan.

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan, dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya (Hery, 2018:3). Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (2016:8) laporan keuangan minimum terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas

- b. Piutang
- c. Persediaan
- d. Aset tetap
- e. Utang usaha
- f. Utang bank
- g. Ekuitas

Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan pos-pos aset berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo. Contoh laporan posisi keuangan berdasarkan SAK EMKM lihat pada gambar

2.1.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi entitas menyajikan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Beban keuangan
- c. Beban pajak

Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain. SAK EMKM mengatur

perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Contoh laporan laba rugi berdasarkan SAK EMKM lihat pada gambar 2.2.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan, informasi yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan yaitu:

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi.
- c. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh catatan atas laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM lihat pada gambar 2.3.

Gambar 2. 1 Contoh Laporan Posisi Keuangan Entitas Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

ENTITAS			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
ASET	Catatan	20x8	20x7
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
<i>Jumlah kas dan setara kas</i>		<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
Piutang usaha			
Persediaan	6	xxx	xxx
Beban dibayar di muka	7	xxx	xxx
Aset tetap			
Akumulasi Penyusutan		(xx)	(xx)
JUMLAH ASET		xxx	xxx
LIABILITAS			
Utang usaha			
Utang bank	8	xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS		xxx	xxx
EKUITAS			
Modal			
Saldo laba (defisit)	9	xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		xxx	xxx

Sumber: SAK EMKM

Gambar 2. 2 Contoh Laporan Laba Rugi Entitas Berdasarkan SAK EMKM

ENTITAS			
LAPORAN LABA RUGI			
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
PENDAPATAN	Catatan	20x8	20x7
Pendapatan usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx
BEBAN			
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain	11	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

Sumber: SAK EMKM

**Gambar 2. 3 Contoh Catatan Atas Laporan Keuangan Entitas Berdasarkan
SAK EMKM**

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7	
1. UMUM	<p>Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.</p>
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING	<p>a. Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>b. Dasar Penyusunan Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.</p> <p>c. Piutang usaha Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.</p> <p>d. Persediaan Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan <i>overhead</i>. <i>Overhead</i> tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. <i>Overhead</i> variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.</p> <p>e. Aset Tetap Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.</p>

Sumber: SAK EMKM

Gambar 2. 4 Contoh Catatan Atas Laporan Keuangan Entitas Berdasarkan SAK EMKM (Lanjutan)

ENTITAS		
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7		
f. Pengakuan Pendapatan dan Beban		
Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.		
g. Pajak Penghasilan		
Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.		
3. KAS		
	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Kas kecil Jakarta – Rupiah	xxx	xxx
4. GIRO		
	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
5. DEPOSITO		
	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
Suku Bunga Deposito:		
Rupiah	<u>20x8</u> 4,50%	<u>20x7</u> 5,00%
6. PIUTANG USAHA		
	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Toko A	xxx	xxx
Toko B	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

Sumber: SAK EMKM

Gambar 2. 5 Contoh Catatan Atas Laporan Keuangan Entitas Berdasarkan SAK EMKM (Lanjutan)

ENTITAS			
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
7.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA		
		<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
	Sewa	xxx	xxx
	Asuransi	xxx	xxx
	Lisensi dan perizinan	xxx	xxx
	Jumlah	xxx	xxx
8.	UTANG BANK		
	Pada tanggal 4 Maret 20x8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.		
9.	SALDO LABA		
	Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.		
10.	PENDAPATAN PENJUALAN		
		<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
	Penjualan	xxx	xxx
	Retur penjualan	xxx	xxx
	Jumlah	xxx	xxx
11.	BEBAN LAIN-LAIN		
		<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
	Bunga pinjaman	xxx	xxx
	Lain-lain	xxx	xxx
	Jumlah	xxx	xxx
12.	BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
		<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
	Pajak penghasilan	xxx	xxx

Sumber: SAK EMKM

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak terlepas dari penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu ini berguna untuk memperkaya teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Penelitian Yoana Pransiska (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM CV. Mahkota Motor belum dapat menghasilkan informasi keuangan yang layak, pembuatan laporan keuangan yang dilakukan hanya sebatas kepentingan pemilik usaha. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang dilakukan oleh CV. Mahkota Motor belum sesuai dengan SAK EMKM.

Penelitian Maya Abram (2018), hasil penelitiannya menyebutkan bahwa berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai studi kelayakan SAK EMKM terhadap UMKM Agus *Ceramics* bahwa Agus *Ceramics* belum layak untuk menerapkan SAK EMKM. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian antara teori dari SAK EMKM dengan praktik yang dilakukan. Selain itu, belum layak dikarenakan Bapak Agus belum memiliki keterampilan dalam membuat laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM. Kemudian belum layak karena manfaat yang didapatkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dari sisi hukum, Bapak Agus belum memadai karena dalam melakukan kegiatan operasionalnya belum sesuai dengan undang-undang (NPWP). Maka dari itu, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan terkait tentang SAK EMKM dari pemerintah.

Penelitian Mortigor Purba (2019), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pembukuan akuntansi yang dilakukan pada UMKM di Kelurahan Tanjung Riau sangat beraneka ragam, namun pada dasarnya mereka melakukan pembukuannya

sebatas pemahaman mereka masing-masing dalam menjalankan usaha. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa setiap pengelola atau pemilik UMKM memiliki kreatifitas sendiri dalam menyusun catatan-catatan usahanya, namun dalam menyusun catatan pembukuan mereka tidak memakai ilmu akuntansi sebagai dasar pembukuan, mereka melakukan pembukuan secara sederhana. Meskipun dalam pembukuan yang dilakukan relatif sederhana, namun pengelola atau pemilik UMKM telah menggunakan bukti-bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dari penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang membuat laporan keuangan belum sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini disebabkan karena banyak UMKM yang belum paham dan belum mengerti pentingnya membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM serta kurangnya waktu untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini digunakan agar penelitian dilakukan secara terperinci dan terarah. Kerangka berpikir disajikan dalam gambar dibawah ini yang dibuat berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang disajikan sebelumnya. Berikut gambar dari kerangka berpikir yang dibuat penulis:

Gambar 2. 6 Kerangka Berpikir

